



KOTO TUO LAUTAN API: SEBUAH PERISTIWA PADA MASA PDRI DI SUMATERA BARAT (1948-1949)

M. Reki Hidayat¹, Etmi Hardi²

Depertemen Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

rekihidayat01@gmail.com¹, etmihardi@yahoo.co.id²

ACCEPTED: 29 APRIL 2023. PUBLISHED: 30 APRIL 2023

Abstract

This study discusses the incident of attacking and burning the houses of the Nagari Koto Tuo community, Lima Puluh Kota Regency by the Dutch in 1949. This event was one of various events during the Dutch Military Aggression II until the establishment of PDRI in Payakumbuh. The purpose of this study is to find out what is the role and involvement of Nagari Koto Tuo during the PDRI period and how the process until this nagari became the target of Dutch attacks. The research method to be used in this study is a historical research method consisting of four stages, namely, the first stage, namely heuristics, source criticism, interpretation and historiography. The results showed that Nagari Koto Tuo had direct involvement as a refugee route passed by the PDRI group who wanted to go to the Riau region and also as one of the battle power bases for the Lima Puluh Kota region.

Key words: Arson incident, PDRI, Military Aggression, Nagari Koto Tuo.

How to Cite: Hidayat. M. R., Hardi. E. (2023). Koto Tuo Lautan Api: Sebuah Peristiwa Pada Masa PDRI Di Sumatera Barat (1948-1949). Puteri Hijau: Jurnal Pendidikan Sejarah (220-226)

*Corresponding author:
rekihidayat01@gmail.com

ISSN 2460-5786 (Print)
ISSN 2684-9607 (Online)

INTRODUCTION

Mempertahankan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah bagi masyarakat Indonesia. Tekanan seakan lebih besar datang pada tahun-tahun awal kemerdekaan Indonesia, dimana Belanda melakukan Agresi Militer II pada tanggal 19 Desember 1948. Tujuannya adalah untuk menghancurkan TNI dan menguasai Ibukota Republik Indonesia yang waktu itu berpusat di Yogyakarta. Maka dari itu Panglima Besar Jendral Soedirman mengirim pesan kilat kepada seluruh pejuang di Indonesia untuk melanjutkan perjuangan secara gerilya (Nasution, 1996, hal. 182).

Mandat untuk melanjutkan pemerintahan Indonesia juga diberikan kepada Mr. Syafruddin Prawiranegara yang pada saat itu sedang berada di Bukittinggi. Syafruddin beserta rombongan lainnya bergerak menuju Halaban karena Bukittinggi sudah tidak aman dan Belanda mulai melakukan pendudukan atas kota tersebut. Pada tanggal 22 Desember 1948 di Halaban, Syafruddin mulai membentuk PDRI dan membagi anggota pemerintahan menjadi beberapa bagian untuk memecah konsentrasi pasukan Belanda. Syafruddin melanjutkan perjalanannya dari Halaban menuju Bidar Alam, Solok (Zed, 1997, hal. 115). Sedangkan rombongan Kolonel Hidayat bergerak ke arah utara menuju Aceh untuk mendirikan Markas Komando Sumatera, dan rombongan yang tetap tinggal di Payakumbuh adalah M. Rasyid yang bergerak ke utara Payakumbuh tepatnya di Koto Tinggi, Suliki dan membentuk Pemerintahan Militer dan beliau sebagai Gubernur Militernya (Kahin, 1997, hal. 258).

Pergerakan rombongan PDRI ke berbagai daerah di Sumatera Barat hingga Riau, membuat daerah yang dilalui oleh rombongan menjadi target operasi militer Belanda dalam menghambat dan menangkap para tokoh PDRI. Payakumbuh sebagai pusat pemerintahan darurat menjadi medan pertempuran antara para pejuang dan Belanda. Daerah seperti Situjuh, Koto Tinggi, Koto Kaciak, Koto Nan Gadang, Lubuak Batingkok dan Koto Tuo pernah menjadi daerah yang diserang Belanda. Untuk itu dibentuklah komando militer daerah yang terdiri dari perangkat daerah yakni MPRD (Markas Petahanan Rakyat Daerah), MPRK (Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan), BPNK (Badan Pengawal Nagari dan Kota), PMT (Pasukan Mobil Teras), dan Dapur Umum yang merupakan bagian dari BPKKP (Badan Penyelenggara Keluarga Korban Perang) yang bergerak di bidang sosial dan logistik perang

(Iskandar et al., 1998, hal. 104).

Frekuensi pertempuran semakin meningkat pada bulan-bulan awal tahun 1949 di sektor Lima Puluh Kota. Belanda melakukan berbagai macam penangkapan pada orang-orang yang dicurigai sebagai mata-mata pejuang Indonesia. Para pejuang lalu melakukan tindakan sabotase guna menghalang pergerakan Belanda dan memberikan beberapa serangan kejutan yang membuat para petinggi Belanda merasa kesal terhadap tindakan para pejuang. Serangan tersebut terjadi pada 10 April 1949 di perbatasan Koto Nan Gadang dan Koto Tuo, tepatnya di Tanjung Pati. PMT (Pasukan Mobil Teras) yang dipimpin oleh Darisun berhasil membunuh 12 prajurit Belanda (Asmara, 2014, hal. 133).

Menanggapi serangan tersebut, Pada awal Bulan Juni 1949, Belanda melakukan serangan balasan ke Nagari Koto Tuo setelah melakukan beberapa kali ultimatum kepada para pejuang. Nagari Koto Tuo dijadikan sasaran selanjutnya setelah Nagari Koto Nan Gadang berhasil diduduki oleh Belanda. Nagari Koto Tuo berjarak ± 6 Km arah utara Kota Payakumbuh, yang berbatasan langsung dengan Nagari Koto Nan Gadang. Aksi balsa dendam Belanda dilakukan dengan cara membakar seluruh rumah warga yang berada di Jorong Tanjung Pati, Pulutan dan Jorong Koto Tuo dan diantara rumah warga tersebut, terdapat juga banyak rumah bagonjong atau rumah gadang yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau. Peristiwa ini dikenal dengan nama "Koto Tuo Lautan Api" (Koesnar, 2008, hal. 3).

Kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah *pertama*, Penelitian karya Rika Sunelti yang berjudul "*Jorong Koto Kaciak Masa PDRI 1948-1949*". Penelitian ini membahas peran Koto Kaciak yang sangat penting pada saat PDRI. Mulai dari menghalangi pergerakan Belanda dari Kota Payakumbuh ke Koto Tinggi, berjuang bersama TNI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pembahasan mengenai peran Jorong Koto Kaciak dalam melakukan pengamanan dan memberikan bantuan tempat tinggal pada rombongan PDRI yang menuju ke Koto Tinggi, sedangkan peneliti lebih memfokuskan penelitian pada peran Nagari Koto Tuo hingga menyebabkan terjadinya peristiwa Koto Tuo Lautan api.

Kedua, Penelitian karya Zusneli Zubir dan Rismadona yang berjudul "*Sumpur Kudus Dalam Perjalanan Sejarah Minangkabau Tahun 1942-1965*". Penelitian ini membahas tentang Sumpur Kudus yakni wilayah yang ada di Sawahlunto yang pernah menjadi tempat persinggahan dari

pemimpin PDRI Syafruddin Prawiranegara dalam menjalankan PDRI. Selain itu penelitian ini tidak hanya membahas PDRI, tetapi mulai dari penyebaran Islam, masa perkembangan Islam, masa PDRI, PRRI, hingga pasca meletusnya G.30.S/PKI 1965. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah pembahasan mengenai perkembangan wilayah Sumpur Kudus pasca kemerdekaan hingga pasca peristiwa PKI 1965, sedangkan peneliti lebih memfokuskan pada peristiwa yang terjadi di Nagari Koto Tuo pada masa PDRI.

Pentingnya penelitian ini adalah peristiwa Koto Tuo Lautan Api pada masa PDRI merupakan salah satu peristiwa yang sangat penting, namun terlupakan. Penyebabnya antara lain banyak masyarakat lebih mengenal kepopuleran daerah seperti Bukittinggi, Halaban, Situjuh dan Koto Tinggi sebagai tempat dimana PDRI dibentuk dan menjalankan pemerintahannya. Namun kalau dikaji, banyak proses dan pengorbanan daerah lain yang ikut andil dalam PDRI dan berperan besar terhadap mempertahankan jalannya pemerintahan Indoneisa. Bahkan di daerah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota hanya segelintir orang yang tau peristiwa Koto Tuo Lautan Api yang umumnya perjuangan peristiwa ini tidak dikenang dan dilestarikan ke generasi selanjutnya. Manfaat penelitian ini ialah untuk menambah pengetahuan akan rangkaian peristiwa heroik PDRI di Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota dan terkhususnya untuk masyarakat Koto Tuo sendiri yang mempunyai jejak sejarah yang patut dikenang dan dilestarikan pada generasi selanjutnya.

METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah. Metode sejarah adalah proses dalam mengkaji, menguji serta menganalisa secara kritis sebuah kajian sejarah yang diangkat menjadi penelitian. Metode ini terdiri dari 4 tahapan yakni *heuristic* (pengumpulan data), *kritik sumber*, *interpretasi*, dan *historiografi* (penulisan) (Gottschalk, 1985, hal. 56). Tahap *pertama*, *Heuristik* adalah pengumpulan sumber-sumber sejarah (Sjamsuddin, 2012). Pengumpulan sumber tertulis dilakukan dengan studi pustaka dengan cara mengambil sumber-sumber dari skripsi terdahulu, buku-buku yang sesuai dan relevan dengan topik yang dibahas. Studi pustaka dilakukan di perpustakaan pusat Universitas

Negeri Padang, perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial, dan ruang baca Departemen Sejarah. Sedangkan sumber lisan diperoleh dengan melakukan wawancara dengan informan dan narasumber yang berkaitan. *Kedua*, kritik sumber merupakan verifikasi sumber yaitu pengujian kebenaran terhadap sumber tersebut. Kritik sumber terdiri dari kritik ekstern dan intern (Sjamsuddin, 2012, hal. 102-104). *Ketiga*, interpretasi merupakan tahap yang menghubungkan dan menggabungkan data dan sumber sejarah yang dapat untuk menjadi sebuah sejarah yang utuh dan benar (Pranoto, 2010, hal. 55). Keempat, *Historiografi* yang merupakan tahap penulisan hasil dari penelitian yang dilakukan dengan cara sistematis dan menggunakan pikiran analisis-deskriptif (Pranoto, 2010, hal. 76).

RESULT AND DISCUSSION

1. Geographical Circumstances

Nagari Koto Tuo merupakan sebuah daerah yang berada di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima puluh Kota. Nagari ini berbatasan langsung dengan Kota Payakumbuh dengan jarak tempuh dari pusat kota \pm 6 Km. Secara geografis Nagari Koto Tuo berbatasan langsung dengan Sarilamak di sebelah utara yang sekarang merupakan ibukota Kabupaten Lima Puluh Kota, di selatan berbatasan langsung dengan Koto Nan Gadang, di barat berbatasan langsung dengan Batu Balang, di timur berbatasan langsung dengan Lubuak Batingkok (Arsip Nagari Koto Tuo).

2. Social Circumstances

Nagari Koto Tuo Pada tahun 1949 memiliki penduduk sekitar kurang lebih 3560 jiwa dengan kepadatan penduduk rata-rata 0,4 / Km. Nagari Koto Tuo sendiri terdiri dari 4 Jorong yakni, Jorong Tanjung Pati, Pulutan, Padang Rantang, dan Koto Tuo. Jumlah penduduk terbanyak berada di Jorong Tanjung Pati, yang mana tidak semua masyarakat Tanjung Pati terdiri dari warga asli, namun banyak terdiri dari masyarakat pendatang (Arsip Nagari Koto Tuo).

Dikisahkan dari cerita masyarakat setempat, Nagari Koto Tuo pada awalnya adalah sebuah *taratak*. Masyarakat Minangkabau menyebut *taratak* sebagai hutan yang jauh dan berulang kali dikunjungi. Perkembangan dari *taratak* tersebut menjadikannya sebagai dusun yang berarti hutan yang dipelihara dan sudah ada penduduknya walaupun masih sangat sedikit. Dari dusun, daerah tersebut berubah

menjadi *koto*, yang mana masyarakat telah menetap dan mengembangkan daerah tersebut menjadi lebih besar sehingga banyak pendatang yang ikut menetap juga di daerah tersebut. Perkembangan yang pesat menjadikan koto tadi menjadi sebuah *nagari* yang berumah tangga. Maksud dari berumah tangga adalah memiliki aturan dan struktur yang berlandaskan "*Adat basandi Syarak, Syarak basandi Kitabullah*" (Dt. Sanggoeno Diradjo, 2009).

Pada saat penjajahan Belanda, nagari ini termasuk wilayah *Onderdistrict* Tanjung Pati. Dan walaupun dalam kondisi terjajah, masyarakat tetap menjalankan sistem kemsyarakatn sesuai dengan adat Minangkabau yang mana dipimpin oleh kepala nagari dengan *ninik mamak* masing-masing suku. Dalam menjalankan pemerintahannya, kepala nagari dibantu oleh *Orang Ampek Jinih* yakni *andiko, malin, manti dan hulu balang* (Koesnar, 2008, hal. 39-40). Berdasarkan sistem itulah pemerintahan di Nagari Koto Tuo berjalan dengan lancar dan membuat masyarakatnya menjadi masyarakat yang bermusyawarah mufakat serta menjunjung tinggi sikap gotong royong.

3. Economic Situation

Nagari Koto Tuo dilalui Sungai Batang Sinama dan sebagian wilayahnya merupakan areal pesawahan yang luas meliputi Jorong Koto Tuo, Padang Rantang dan sebagian kecil wilayah Jorong Pulutan. Hal ini mendorong ekonomi masyarakat di sektor pertanian, namun di Jorong Tanjung Pati sendiri, perekonomian utama masyarakatnya adalah dengan melakukan perdagangan dan membuka beberapa usaha jasa. Hal ini diakibatkan karena pada umumnya masyarakat yang mendiami daerah Tanjung Pati kebanyakan adalah para pendatang dari daerah lain. Tanjung Pati yang wilayahnya berada di tepi jalan raya Sumbar-Riau membuat masyarakatnya lebih memilih untuk mendirikan wiraswasta dan disamping itu ada sebagian yang memiliki perkebunan seperti kebun coklat dan karet (Wawancara Dion Isnaini, 38 Tahun, Tanjung Pati).

4. Koto Tuo and PDRI

Belanda mulai masuk ke Payakumbuh sehari setelah PDRI dibentuk di Halaban pada tanggal 23 Desember 1948. Kedatangan Belanda adalah dalam rangka mencari para tokoh-tokoh PDRI yang telah berpecah menjadi beberapa rombongan dan menyebar ke seluruh pelosok

Sumatera Barat. Rombongan dari Syafruddin berangkat menuju Bidar Alam dan rombongan dari M. Rasyid tetap tinggal di Payakumbuh dan menuju ke Koto Tinggi untuk membentuk pemerintahan militer dan pusat-pusat komando pertempuran wilayah Payakumbuh dan Lima Puluh Kota (Kahin, 1997, hal. 258).

Pembentukan komando militer dimaksudkan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan rombongan PDRI dan daerah yang akan dilalui oleh rombongan tersebut. Hal ini disebabkan karena setelah pertemuan di Halaban, Belanda mulai melakukan berbagai penyerangan di wilayah Payakumbuh. Pada awal Januari Belanda melakukan penyerangan ke Situjuh karena adanya kebocoran informasi ke Belanda tentang pertemuan para tokoh penting militer dan PDRI untuk membahas tindakan yang akan diambil dalam mengatasi Belanda. Akibatnya 69 orang pejuang meninggal dunia termasuk pemimpin perlawanan Chatib Sulaiman (Iskandar et al., 1998, hal. 111-113).

Dari peristiwa Situjuh, Belanda melanjutkan serangan ke seluruh pelosok Kota Payakumbuh, mulai dari Labuah Silang, Koto Nan 4, Koto Nan Gadang dan berlanjut ke Koto Tinggi hingga nantinya sampai ke Koto Tuo. Untuk mengatasi hal tersebut, Gubernur Militer M. Rasyid mengeluarkan Instruksi No: 13/G.M./Instr dan No: 24/G.M./Instr pada Januari 1949 untuk membentuk perangkat keamanan nagari BPNK dan PMT (Husein, 1992, hal. 685 & 722). Dibentuknya pasukan BPNK dan PMT yang memiliki tugas untuk menghambat pergerakan Belanda dan melakukan berbagai macam sabotase terhadap Belanda.

Di Nagari Koto Tuo, didirikan basis komando pertempuran yang terdiri dari BPNK dan PMT. Pendirian basis komando pertempuran di wilayah Koto Tuo berdasarkan peta jalur rombongan PDRI yang akan melakukan pengungsian ke wilayah Riau. Untuk menghambat langkah Belanda, para pejuang memutuskan akses seperti jembatan dan merobohkan pohon-pohon dipinggir jalan raya Payakumbuh-Tanjung Pati (Wawancara Saiful, 57 Tahun, Tanjung Pati).

Bulan Maret 1949 menandai awal dari peristiwa Koto Tuo Lautan Api. Beriringan dengan pembentukan pasukan BPNK dan PMT di wilayah Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota, Gubernur Militer mengeluarkan khusus yang ditujukan untuk komando pertempuran wilayah Payakumbuh. instruksi Pe.Ma./M.P Gubernur Militer No.001/Ist.Rhs tanggal 1 Maret 1949 secara resmi menunjuk Mardisun sebagai Ketua dari pemerintahan darurat untuk wilayah Kota

Payakumbuh dengan wakil dr. Adnan W. D. dan anggotanya yang terdiri dari Djufri, Damir Djanid, Zaidar Noerdin dan Chaidir (Saiful, 2009).

Setelah itu dibentuk juga Wali Perang sebagai pusat wilayah komando di sekitar Nagai Koto Nan Gadang dan Koto Tuo. Wali Perang itu antara lain adalah Junias Janaid untuk wilayah Lubuak Batingkok, Khatib Bermawi untuk wilayah Koto Tuo, Dt. Bosa Nan Hitam untuk wilayah Gurun dan Syamsuar Yahya untuk wilayah Koto Nan Gadang (Saiful, 2009).

Dengan dibentuknya wilayah komando, diharapkan dapat memperkuat kekuatan tempur dan memperkuat koordinasi antar wilayah komando. Namun hal tersebut diketahui pihak musuh dan benar saja, Belanda langsung memperkuat pos-posnya di wilayah Payakumbuh dan melakukan peyerangan yang tujuannya untuk mengintimidasi masyarakat dan mencari informasi tentang PDRI dan basis para pejuang. Wilayah yang paling terdampak adalah wilayah Koto Nan Gadang, Payakumbuh. Wilayah tersebut menjadi medan pertempuran antara pejuang dan Belanda yang menyebabkan banyak warga mengungsi meninggalkan wilayah Payakumbuh, terutama ke daerah Kecamatan Harau, Tanjung Pati, dan Koto Tuo (Saiful, 2009).

5. The Occurrence of the Koto Tuo Sea of Fire Event

Pencarian informasi tentang PDRI di Koto Tuo oleh Belanda telah dilakukan sejak bulan Desember 1948. M. Sain yang waktu itu menjabat sebagai Komandan Gerilya Sektor II Payakumbuh mendapat kabar bahwasanya pasukan CPM Divisi IX Banteng pimpinan Letnan Amir Hamzah melakukan kontak senjata dengan pasukan Belanda di Anak Kubang, Tanjung Pati. Akibatnya anggota pasukan yang bernama Koprak Saham meninggal dunia dan Mayor Darwis mengalami luka-luka. M. Sain lalu membantu pasukan tersebut dengan melakukan evakuasi ke Limbanang (Saiful, 2009).

Pasukan Belanda terus melakukan penyerangan hingga dini harinya dan menyebabkan markas Front Gerilya Lima Puluh Kota berpindah ke Batu Nan Limo, Simalanggang. Dalam penyerangan tersebut, pasukan Belanda juga membunuh para pemuda yang mereka temui di wilayah Koto Tuo yang merupakan anggota BPNK, yakni Dt. Anso, Amarellah, Marin Atiak, dan Dt. Sinaro Panjang (Koesnar, 2008).

Penyerangan yang dilakukan Belanda membuat para pejuang ingin melakukan perlawanan balik. Maka pada bulan berikutnya

dibentuklah PMT (Pasukan Mobil Teras) dan untuk wilayah Koto Tuo ditunjuk M. Sain dan Darisun sebagai komandan pasukan. M. Sain memiliki markas yang bertempat di Masjid Al-Ikhlas di Boncah Pulutan. Sedangkan Darisun membuat markas di Surau Haji Sulaiman di Padang Rantang. Mereka juga membentuk anggota perwakilan pada setiap jorong di Koto Tuo yang terdiri dari Rasyid Dt. Ngiang, Mawi, dan Rabai untuk Jorong Koto Tuo, Bainsi untuk Koto Tengah, Rantang Zamawi untuk wilayah Padang Rantang, Syamsulaini untuk wilayah Tanjung Pati, dan Imam Bise untuk wilayah Pulutan (Wawancara dengan Saiful SP, 57 Tahun, Tanjung Pati).

Berdasarkan instruksi dari Gubernur Militer, para pejuang lalu melakukan aksi sabotase pada awal bulan Maret 1949. Jembatan-jembatan sebagai akses memasuki Koto Tuo diruntuhkan dan pohon-pohon di jalan raya Payakumbuh-Tanjung pati ditebang dan letakkan di tengah jalan untuk menghambat pergerakan kendaraan Belanda. Melihat tindakan para pejuang, Belanda kemudian memberikan pengumuman yang berisi "HENTIKAN PENGGALIAN DAN PENEBAHAN KAYU, DI SEPANJANG JALAN. BILA MASIH DITERUSKAN JUGA, BELANDA AKAN MELAKUKAN SERANGAN KE TANJUNG PATI, BATU BALANG SEKITARNYA" (Wawancara dengan Asril Lansuan, Tanjung Pati).

Mendengar ancaman Koto Tuo akan diserang oleh Belanda, M. Sain dan Darisun melakukan koordinasi dengan mata-mata pasukan yang ada di Payakumbuh untuk mendapatkan informasi pergerakan Belanda. Pada 7 Maret 1949, Komandan Peleton Darisun mendapatkan informasi tentang adanya patroli pasukan Belanda ke Tanjung Pati dan Darisun mengambil tindakan untuk melakukan seangan kejutan terhadap Belanda di perbatasan Payakumbuh dengan Koto Tuo di Padang Gantiang. Akibat aksi pencegahan tersebut banyak tentara pasukan Belanda yang berguguran (Saiful, 2009).

Serangan yang dilakukan oleh pejuang meningkat selama akhir Maret sampai memasuki bulan April 1949. Patroli yang dilakukan oleh Belanda tidak pernah sampai ke wilayah Tanjung Pati karena akses melalui Jembatan Lampasi di Payolinyam dan di Padang Gantiang diputus oleh pejuang. Oleh karena itu kemarahan Belanda memuncak dan mulai memberikan ultimatum kepada pejuang dan masyarakat Koto Tuo. Ultimatum tersebut berbunyi "Seluruh pasukan Gerilya supaya menyerah dan menghentikan perlawanan dan sabotase. Bila masih dilakukan, Belanda akan melakukan penyerangan besar-

besaran dan menghancurkan seluruh bangunan yang ada sejak dari Tanjung Pati, Pulutan dan Koto Tuo. Termasuk Nagari Batu Balang.” (Wawancara dengan Asril Lansuan, Tanjung Pati).

Belanda mulai melakukan serangan ke Tanjung Pati pada 1 Juni 1949. Serangan tersebut dilakukan pada subuh dan dimulai dari Jorong Tanjung Pati disaat masyarakatnya belum mulai melakukan aktifitas dan keadaan masih sepi. Sebelumnya sebagian masyarakat Tanjung Pati telah melakukan evakuasi dan meninggalkan rumah mereka. Oleh karena itu Belanda menemui wilayah Tanjung Pati dalam keadaan kosong dan melakukan pembakaran rumah-rumah di simpang 4 Tanjung Pati dan menuju kearah Kampung Dalam hingga Kayu Gadang (Wawancara dengan Saiful, 57 Tahun, Tanjung Pati). Melihat asap yang mengepul di udara, kepanikan terjadi di wilayah Pulutan yang menjadi target Belanda selanjutnya. Sebagian masyarakat di Pulutan tidak mengetahui akan serangan Belanda yang telah memasuki Tanjung Pati. Belanda lalu membomboni hanguskan wilayah Pulutan (Wawancara dengan Saiful SP, 57 Tahun, Tanjung Pati).

Setelah 9 hari melakukan pembakaran di wilayah Tanjung Pati dan Pulutan, Belanda bergerak ke Jorong Koto Tuo. Di Jorong Koto Tuo, Belanda juga melakukan pembakaran terhadap rumah-rumah warga. Namun, di Jorong Koto Tuo tidak hanya terdapat rumah warga, melainkan memiliki banyak Rumah Gadang/Rumah Bagonjong. Tanpa pandang bulu, Belanda lalul membakar semua rumah bagonjong tersebut. Sebanyak 54 buah rumah, gedung dan kedai kelontong dan 50 buah rumah bagonjong terbakar di jorong tersebut. Pembakaran terhadap banyaknya rumah bagonjong menyebabkan masyarakat tidak hanya kehilangan tempat tinggal, namun juga merugikan ekonomi dan kekayaan budaya yang terdapat didalamnya (Wawancara dengan Saiful SP, 57 Tahun, Tanjung Pati).

Namun diantara rumah bagonjong yang terbakar, masih ada satu buah rumah yang tidak dimakan api. Rumah tersebut milik warga yang bernama Syekh Mudo Abdul Qadim dan istrinya yang bernama Fatimah. Rumah bagonjong yang mereka tempati sebenarnya ada 3 buah di dekatnya, dan hanya dua buah yang terbakar api dan menyisakan satu buah yang dapat dilihat sampai sekarang sebagai bukti bahwa peristiwa Koto Tuo Lautan Api itu benar terjadi pada tahun 1949 (Koesnar, 2008).

Keberhasilan Belanda melakukan pembakaran di Nagari Koto Tuo selama 10 hari dari tanggal 1-10 Juni membuat sebagian pasukan

Belanda dalam kondisi kelelahan dan tidak memikirkan serangan balik dari pejuang. Pada hari-hari terakhir penyerangan di Koto Tuo, pasukan Belanda yang akan meninggalkan Koto Tuo diserang oleh pasukan PMT pimpinan Darisun di Padang Gantiang dan Tanah Tinggi. Tanpa perlawanan pasti, pasukan Belanda mengalami luka-luka dan ada yang terlihat rebah dijalanan akibat kontak senjata dengan para pejuang (Asmara, 2014, hal. 134).

Total secara keseluruhan lebih kurang sebanyak 122 rumah di Jorong Tanjung Pati dan Pulutan hangus terbakar dan sebanyak 104 buah rumah yang mana 50 diantaranya adalah rumah bagonjong hangus terbakar di Jorong Koto Tuo dan Padang Rantang. Masyarakat melakukan pembersihan akan sisa-sisa pembakaran setelah Belanda meninggalkan Koto Tuo. Mereka mulai melanjutkan kehidupan dan mulai memabangun kembali nagari dari keterpurukan serta tidak akan melupakan peristiwa yang mereka alami sebelumnya sebagai bagian bukti kekejaman Belanda saat menjajah Indonesia (Asmara, 2014, hal. 135-136).

CONCLUSION

Nagari Koto Tuo pada masa PDRI merupakan sebuah daerah yang memiliki peran dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan dari Agresi Militer Belanda II pada tahun 1948. Seusai pembentukan PDRI di Halaban, para pemimpin PDRI melakukan pengungsian ke daerah-daerah pelosok di Sumatera Barat hingga ke Riau dalam memecah konsentrasi pasukan Belanda. Peran inilah yang dilakukan oleh Nagari Koto Tuo dalam mendukung PDRI, karena secara geografis Koto Tuo berbatasan langsung dengan Payakumbuh yang merupakan pusat markas Belanda dan juga sebagai pintu gerbang ke Riau bagi pemimpin PDRI yang akan menuju Bangkinang. Oleh sebab itu Koto Tuo menjadi salah satu target Belanda dalam melakukan berbagai rangkaian serangan di Payakumbuh dan Lima Puluh Kota. Maka kewajiban dari PMT dan BPNK untuk melindungi dan memberikan rasa aman pada rombongan PDRI yang lewat.

Berawal dari kegiatan sabotase dan penyerangan terhadap Belanda oleh para pejuang, membuat Belanda geram dan memberikan ultimatum pada para pejuang yang berbasis di Koto Tuo. Penyerangan tersebut dilakukan selama 10 hari mulai dari tanggal 1 sampai dengan 10 Juni 1949 dengan membakar seluruh rumah masyarakat yang ada pada setia

orong di Nagari Koto Tuo. Jorong yang paling parah akan serangan tersebut adalah Jorong Koto Tuo, yang mana banyak Rumah Adat Minangkabau dibakar oleh Belanda yang menyebabkan kerugian materil dan hilangnya kekayaan kebudayaan yang ada di dalamnya. Peristiwa pembakaran itu akan tetap dikenang oleh masyarakat Koto Tuo sebagai “Koto Tuo Lautan Api”.

Wawancara dengan Fafia Lora, 28 Maret 2023, Koto Tuo.

Wawancara dengan Dion Isnaini, 28 Maret 2023, Pulutan.

ACKNOWLEDGMENT

Penelitian ini dibuat adanya dukungan dan bantuan yaitu Dekan FIS, Kadep Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Padang, dan Wali Nagari serta Kepala Jorong di Nagari Koto Tuo.

REFERENCE LIST

- Asmara, D. (2014). *Suluh, Vol.15, No.19, Desember 2014* 124. 15(19), 124–137.
- Dt. Sanggoeno Diradjo, I. (2009). *TAMBO ALAM MINANGKABAU Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang Orang Minangkabau*. Kristal Multimedia.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah, Terjemahan oleh Nugroho Notosusanto*. Universitas Indonesia Press.
- Husein, A. (1992). *Sejarah Perjuangan Kemerdekaan R.I Di Minangkabau/Riau 1945-1950*. Pt. New Aqua Perss.
- Iskandar, M., Said, Y., & Wulandari, T. (1998). *Peranan Desa Dalam Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Barat 1945-1950*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kahin, A. (1997). *Perjuangan Kemerdekaan Sumatera Barat Dalam Revolusi Nasional Indonesia 1945-1950*. Angsana Mamanda.
- Koesnar, E. (2008). *Koto Tuo Lautan Api*. The Minangkabau Foundation.
- Nasution, A. H. (1996). *Sejarah Perjuangan Nasional Dibidang Bersenjata*. Mega Bookstoore.
- Pranoto, S. W. (2010). *Teori dan Metodologi Sejarah*. Graha Ilmu.
- Saiful. (2009). *Luhak Lima Puluh Kota Basis PDRI (Pemerintahan Republik Indonesia)*. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Sjamsuddin, H. (2012). *Metode Sejarah*. Ombak.
- Zed, M. (1997). *Somewhere in the Jungle Pemerintah Darurat Republik Indonesia Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan*. Pustaka Utama Grafiti.
- Wawancara dengan Saiful SP, 28 Maret 2023, Tanjung Pati.